



Perjuangan Panjang Pemetaan SDG's

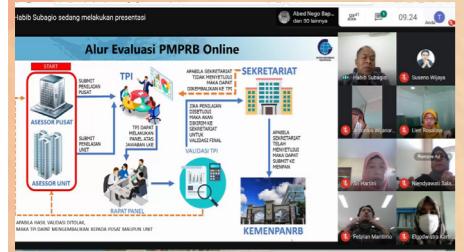
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. SDG's berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut "NO ONE LEFT BEHIND".

Badan Informasi Geospasial berkoordinasi dengan Bappenas berkomitmen untuk melaksanakan SDG's secara bertahap sampai ke level desa. Untuk mendukung kegiatan ini, Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan pemetaan batas desa seamless seluruh Indonesia dan sudah dilakukan pengisian kodefikasi wilayah administrasi BPS. Sebagai permulaan, Badan Informasi Geospasial telah membuat *Prototype Pemetaan SDG's* hingga level desa untuk beberapa tema seperti Pemetaan Elektrifikasi, Pemetaan Persebaran Tenaga Kesehatan, Pemetaan Pengguna Internet dan Telepon Genggam, Pemetaan Kemiskinan, hingga Pemetaan Kejadian Bunuh Diri. Semua pemetaan tematik tersebut dilakukan hingga di level desa.

Dalam pemetaan SDG's, tantangan yang cukup besar bagi Badan Informasi Geospasial adalah bagaimana memperoleh data-data statistik yang ada di validata. Saat ini, Badan Informasi Geospasial masih berusaha melalui koordinasi dengan Bappenas serta mengirimkan surat secara langsung kepada K/L selaku validata yang dibutuhkan datanya dalam menunjang tercapainya tujuan SDG's. Hingga saat ini, peran BIG yang sudah berjalan dalam rangka mendukung SDG's adalah kegiatan Atlas TPB yang dilakukan oleh Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. [Diah Retno Minarni, 2020].

Program SDG's bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan RB



Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut birokrasi pemerintahan berjalan menyesuaikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Langkah yang diambil salah satunya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu perubahan pada aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumberdaya manusia. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional oleh aparatur negara dapat berhasil dan mencapai *good governance*.

Pada hari Kamis, 18 Juni 2020, Deputi Bidang IGT melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan RB secara online dikarenakan pandemi Covid19 yang masih berlangsung. Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang IGT dan juga dihadiri oleh Inspektorat, Biro PKH dan anggota Tim RB Kedepatian IGT. Pada agenda rapat kali ini, disampaikan progres kemajuan RB pada setiap area perubahan. Selanjutnya juga dibahas mengenai pengisian Lembar



Kerja Evaluasi (LKE). Pengisian LKE tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga setiap area perubahan didampingi oleh perwakilan Biro PKH dan juga Inspektorat. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu mengawal pengisian LKE serta meminimalisir kekeliruan dalam prosesnya.

Walaupun penilaian RB kali ini merupakan penilaian untuk kinerja tahun 2019, namun tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi bukti dukung tahun 2020 apabila sudah tersedia. Oleh karena itu, pada rapat ini juga sekaligus memaparkan bukti dukung yang tersedia di Biro PKH yang kemudian dapat juga digunakan untuk melengkapi data dukung Tim RB IGT apabila dibutuhkan.

Agenda RB selanjutnya adalah melengkapi pengisian LKE Pusat dan LKE Unit Kerja oleh assesor pusat dan assessor unit. Kemudian dilanjutkan dengan proses validasi serta verifikasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Tahap selanjutnya adalah validasi final oleh ketua RB. Pada tahap validasi ini, berkas dapat dikembalikan apabila ada kompetensi yang perlu diperbaiki. Kemudian LKE yang sudah final diserahkan ke Kementerian PAN-RB sebagai bahan evaluasi. Seluruh proses ini diharapkan dapat selesai pada 30 Juni 2020. Pada rapat ini disampaikan kembali pentingnya internalisasi RB sehingga RB bukan hanya sekedar angka tapi juga dapat dipahami seluruh pegawai di BIG. [Dinar Faraiyah Rahmah, 2020].

Peran BIG dalam Penyusunan Neraca SDA dan Lingkungan Hidup

Neraca sumberdaya dan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang menggambarkan cadangan/aset sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perubahannya yang disajikan dalam bentuk neraca aset dalam satuan fisik dan neraca aset dalam satuan uang. Dalam Peraturan tersebut, Neraca SDA dan LH disusun oleh instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). BPS kemudian menyusun turunan dari PP no 46 tahun 2017 dalam bentuk Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam rancangan tersebut, BIG dilibatkan dalam proses persiapan data spasial dasar berupa peta penutup lahan dimana BIG merupakan validata data tersebut, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun neraca lahan.

Klasifikasi penutup lahan yang digunakan dalam penyusunan Neraca SDA dan LH menggunakan klasifikasi penutup lahan SEEA (*Systems of Environmental Economic Accounting*). SEEA merupakan framework akuntansi yang mencatat secara lengkap stok dan arus yang relevan untuk analisis dalam hal isu keterkaitan lingkungan dan ekonomi. SEEA menyediakan framework yang mengkombinasikan beragam sumber data untuk menyusun agregat, indikator, dan tren isu lintas spektrum lingkungan dan ekonomi. Klasifikasi penutup lahan yang dikeluarkan oleh BIG menggunakan acuan SNI 8743:2019 tentang Penyajian peta rupabumi Indonesia skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Klasifikasi penutup lahan versi SEEA tentunya berbeda dengan klasifikasi penutup lahan pada peta rupa bumi Indonesia yang disusun oleh BIG sehingga nantinya akan dilakukan proses reklassifikasi. Kegiatan ini akan dilakukan oleh BIG pada tahun 2021 dalam bentuk output kegiatan Peta Neraca Spasial Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Proses

reklassifikasi ini nantinya akan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan justifikasi dan penyepakatan hasil reklassifikasi. Setelah hasil reklassifikasi disepakati dalam bentuk juknis, selanjutnya akan disusun peta prototype neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup. [Rahmatia Susanti, 2020].

Tabel 1. Klasifikasi Penutup Lahan Skala 1:250.000 Menurut SNI 8743:2019 dan SEEA

Klasifikasi Penutup Lahan	
SNI 8743:2019	SEEA
Sawah irigasi	Permukiman Buatan (termasuk kawasan urban area terkait)
Perkebunan	Tanaman Berdaun
Hutan	Tanaman Berkayu
Ladang	Tanaman dengan beberapa lapisan
Daerah Permukiman	Padang rumput
Danau	Area tertutup pohon
Rawa	Tanaman Bakau
Empang/Tambak	Area tertutup semak belukar
Penggaraman	Vegetasi berserak dan/atau vegetasi herba, akutik atau rawa-rawa
Pasir/Kerakal	Area vegetasi alami yang jarang
Beting Karang	Lahan tandus
	Wilayah bersaljuabadi dan gletser
	Wilayah perairan darat
	Wilayah pesisir pantai dan pasang surut

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUTUS PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor



PPTRA : (021) 8764613

FAX : (021) 8764613

Email : redaksi.ptra@gmail.com

Twitter: @pptra_big

Instagram : @pptra_big

http://big.go.id/newsletter/



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

Media Informasi Pemetaan Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas

Catatan Beranda

besar masih dilakukan secara *online*, namun akhir Juni telah mulai menerapkan rapat/pertemuan dengan cara bertatap muka langsung (*offline*) secara selektif. Baru awal Juli nanti akan dilakukan uji coba survey lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat yang dilaksanakan secara selektif dan hati-hati. Selama bulan Juni 2020 ini, beragam kegiatan telah dilaksanakan, antara lain pembahasan anggaran dan kegiatan 2021 dengan *model beauty contest*, dilanjutkan *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan DJA, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja PMPRB baik di lingkungan BIG maupun di Kedepatian BIGT, pertemuan teknis masing-masing kegiatan, koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, dsb. Namun demikian, dari sisi penyerapan anggaran masih jauh dari target, hal ini disebabkan karena survey lapangan dan pertemuan/FGD yang melibatkan banyak peserta belum bisa dilaksanakan hingga bulan Juni ini, sehingga realisasi anggaran masih belum optimal.

Hingga penghujung Bulan Juni 2020, kasus positif covid19 di Indonesia masih terus meningkat. Tercatat dari laman resmi gugus tugas covid 19 dan covid19.big.go.id sebanyak 56.385 orang terkonfirmasi positif, 2.876 orang meninggal dan 24.806 orang sembuh. Sementara secara global, Amerika Serikat mendukri jumlah tertinggi kasus positif covid19, disusul Brazil, Rusia, India dan Inggris. Namun demikian sejumlah negara termasuk Indonesia saat ini telah menerapkan *new normal* atau tatanan kehidupan baru, dengan membuka secara bertahap fasilitas publik seperti pusat-pusat perekonomian, perdagangan, industri, dll termasuk aktifitas perkantoran.

Kegiatan kedinasan di kantor Badan Informasi Geospasial juga telah mulai diberlakukan penyesuaian sistem kerja berupa pengaturan sistem kerja secara WFO (bekerja dari kantor) dan WFH (bekerja dari rumah). Bagi pegawai yang melakukan WFO maksimal jumlah pegawai dibatasi sebanyak 30% dari jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja pratama, sesuai dengan SE Kepala BIG Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatatan Normal Baru di Lingkungan BIG yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2020. Selain itu, BIG juga melaksanakan *Rapid Test* tahap pertama yang diselenggarakan pada Hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, kepada kurang lebih 300 pegawai. Dari hasil *rapid test* tersebut, dinyatakan seluruh pegawai yang di tes dinyatakan non-reaktif.

Putus Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) pada kondisi awal *new normal* ini terus melakukan kegiatan dengan tetap memberlakukan protokol Kesehatan, yaitu memakai masker dimana saja berada, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman minimal 1,5 meter pada saat berkumpul. Pelaksanaan asistensi dan supervisi Rencana Tata Ruang, FGD, dan diskusi lainnya sebagian

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Putus Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |

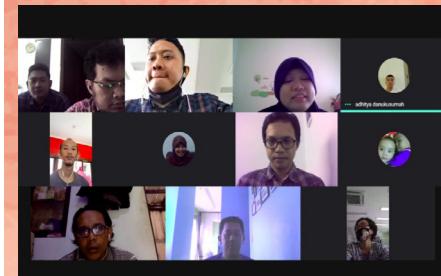
| Editor: Prita Brada Bumi, Sri Eka Wati, Chintia Dewi, Izzuddin Abdul Aziz |

| Desain Tata Letak: Gin Gin Gustiar |

Supervisi Integrasi IGT SDA untuk Mendukung KLHS RPJMD Kabupaten/Kota di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat

Badan Informasi Geospasial, melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas telah mengembangkan peta neraca sumberdaya alam 4 komponen (lahan, hutan, air, mineral dan batubara) dengan cakupan wilayah kabupaten/kota maupun wilayah sungai. Neraca tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang penyusunan neraca spasial sumberdaya alam yang dibakukan pada tahun 2015.

Peta neraca disusun untuk menjawab kebutuhan informasi akan kondisi terkini sumberdaya alam yang nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup keberlanjutan. Dalam **Permendagri No. 7 Tahun 2018** tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, bahkan melibatkan neraca sumberdaya alam digunakan sebagai salah satu instrumen penyusunan KLHS.



Pada tahun 2020, PPTRA BIG melaksanakan kegiatan Integrasi IGT SDA untuk Mendukung KLHS RPJMD Kabupaten/Kota di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Miranthal Konsultan Permai (MKP) ini sudah berjalan

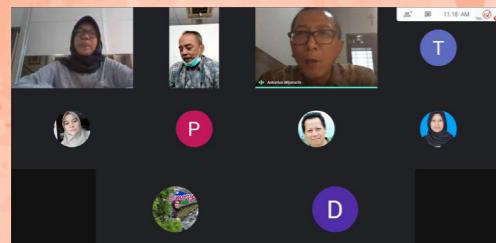
sejak Bulan Mei 2020. Untuk mengawali kegiatan agar berjalan sesuai rencana yang telah disepakati dalam kontrak, maka tim teknis Bidang PDS melakukan supervisi teknis secara intensif. Kegiatan supervisi teknis dilaksanakan secara daring karena keterbatasan kondisi akibat meluasnya pandemi Covid-19.

Sebagai tindak lanjut atas hasil supervisi teknis pertama (16 Juni 2020), maka pada hari Senin, 29 Juni 2020, kembali dilaksanakan supervisi teknis kedua. Supervisi yang dihadiri oleh tim teknis PT. MKP dan tim teknis Bidang PDS membahas progres pengumpulan data dan interpretasi citra satelit pada tahun akhir (2019). Terkait pengumpulan data, pihak pelaksana pekerjaan telah melakukan koordinasi awal dengan instansi daerah setempat untuk mengakses data yang diperlukan. Untuk interpretasi citra tahun akhir telah terlaksana pada sebagian besar wilayah kajian. Hasil interpretasi ini selanjutnya akan dikirimkan kepada tim teknis BIG untuk dilaksanakan kontrol kualitas.

Kegiatan supervisi diakhiri dengan beberapa kesepakatan terkait dukungan persyaratan resmi untuk memperoleh data yang diperlukan serta berbagai masukan untuk memudahkan proses kontrol kualitas selanjutnya. Diharapkan pihak pelaksana pekerjaan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai *timeline* yang disepakati.

Pada akhir kegiatan, disepakati untuk sementara tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana sembari memperhatikan perkembangan situasi pandemi. Selain itu, pihak pelaksana pekerjaan juga harus fokus menyelesaikan setiap tahapan kegiatan agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. [Sri Eka Wati, 2020].

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Gunungapi



Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunungapi aktif terbanyak di dunia. Terdapat 127 gunungapi aktif di Indonesia yang tersusun atas 77 gunungapi tipe A, 29 gunungapi tipe B dan 21 gunungapi tipe C. Gunungapi tipe A merupakan gunungapi yang tercatat pernah erupsi magmatik sekurang-kurangnya sekalipun setelah tahun 1600 Masehi, oleh karena itu tipe ini dianggap masih ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita saat ini. Gunungapi tipe B, sesudah tahun 1600 belum tercatat lagi terjadi erupsi magmatik namun masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik. Sedangkan gunungapi tipe C, sejarah erupsi tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa solfatara/fumarola pada tingkat rendah.

Berada di kawasan gunungapi aktif, Indonesia identik dengan wilayah rawan bencana. Maka untuk merubah cara pandang tersebut diperlukan adanya

informasi bahwa berada di kawasan gunungapi aktif tidak selalu merugikan tetapi juga memberikan berkah karena potensi sumberdayanya. Pada tahun 2020, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melalui bidang Atlas dan Pemetaan Sosial menyusun Atlas Bentang Sumberdaya Gunungapi Edisi Jawa Bagian Barat. Atlas edisi ini disusun untuk melengkapi Atlas Bentang Sumberdaya Gunungapi di Pulau Jawa. Atlas ini tidak hanya menampilkan aktifitas kegunaunganpi, tetapi lebih kepada aspek pemanfaatan lahan yang diakibatkan karena letusan gunungapi.

Pada Tanggal 22 Juni 2020 dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Gunungapi secara *online* yang dipimpin oleh Deputi Informasi Geospasial Tematik dan melibatkan narasumber dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian ESDM dan Universitas Gadjah Mada. FGD ini membahas tentang konsep atlas, pengelompokan kompleks gunungapi, pembagian kawasan dari kompleks gunungapi (kerucut, lereng tengah, lereng kaki) dan sumberdaya gunungapi pada masing-masing kawasan di kompleks gunungapi.

Pembagian kompleks gunungapi disepakati berdasarkan gunungapi tipe A yang ada di Jawa Bagian Barat. Kompleks gunungapi Tipe A di Jawa Bagian barat tersebut meliputi kompleks Gunungapi Salak, Gunungapi Gede, Gunungapi Tangkuban Perahu, Gunungapi Guntur, Gunungapi Papandayan, Gunungapi Galunggung, Gunungapi Ciremai. Untuk pembagian kawasan yang akan ditampilkan berdasarkan morfologi gunungapi yang terdiri dari bagian kerucut gunungapi, lereng tengah dan dataran kaki gunungapi. [Setiyani, 2020].

Survey Data Statistik Desa untuk Pemetaan Geostatistik SDG's

Pemetaan Geostatistik ini bertujuan untuk Mengintegrasikan 2 (dua) IG Tematik/ lebih dengan standar penyusunan IG yang telah ditetapkan oleh BIG dalam KSP dengan data statistik sehingga menghasilkan informasi baru dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pengintegrasian tersebut dilakukan pada Peta Dasar yang telah disinkronkan dengan Kode Administrasi BPS.

Data IG Dasar disediakan oleh BIG, temasuk batas wilayah administrasi desa yang telah diselesaikan oleh BIG melalui kegiatan delineasi Kartometris sejak tahun 2014 - 2019. Data tersebut akan disincronkan dengan Kode Administrasi wilayah yang dimiliki BPS. Setelah sudah sesuai, data statistik yang dimiliki oleh BPS dapat ditampilkan dalam suatu Sistem Informasi Geostatistik yang tepat dan akurat baik secara Geospasial ataupun secara statistik. Selanjutnya Sistem Informasi Geostatistik ini dapat dijadikan *tools* yang handal bagi Bappenas dalam menentukan arah kebijakan Nasional. Pemetaan Geostatistik ini harapannya dapat dilakukan hingga ke level desa, Untuk itu diperlukan data-data statistik yang diperoleh langsung dari desa.

Survei data statistik di tingkat Desa dilakukan dengan melakukan wawancara dengan perangkat desa yang berada di Kantor Desa. Survei ini dilakukan di desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dalam survei ini, tim melakukan tanya jawab dengan perangkat desa untuk mengetahui data-data apa saja yang dimiliki oleh desa dan dapat menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).



Kerjasama Dukungan Pembuatan Peta Dasar 1:5000 oleh BIG untuk Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN



Dalam mendukung perekiraman penyelesaian peta rencana tata ruang dalam hal ini RDTR, BIG kembali bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun peta RDTR melalui bantuan teknis pembuatan peta dasar. Bantuan ini diperlukan untuk 26 BWP RDTR yang tersebar di tiga direktorat dibawah Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Adapun pembagian bantuan tersebut adalah sebanyak 2 BWP RDTR di Direktorat Perencanaan, 18 BWP di Direktorat Penataan Kawasan dan 6 BWP di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.

Bentuk bantuan yang kini diberikan bukan lagi dalam bentuk pembinaan melainkan penyusunan peta dasar. Untuk 26 BWP tersebut diatas, masing-masing BWP memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga kami membagi ke dalam empat kelompok/*cluster* sebagai berikut:

1. Cluster 1: Sudah terdapat peta dasar di BIG (sebagian besar menggunakan sumber data foto udara, namun harus di cek ulang tahun perekiramannya)
2. Cluster 2: Sudah terdapat CSRT yang sudah terorthorektifikasi di BIG namun belum terdapat peta dasar (*Disclaimer* : sumber data CSRT

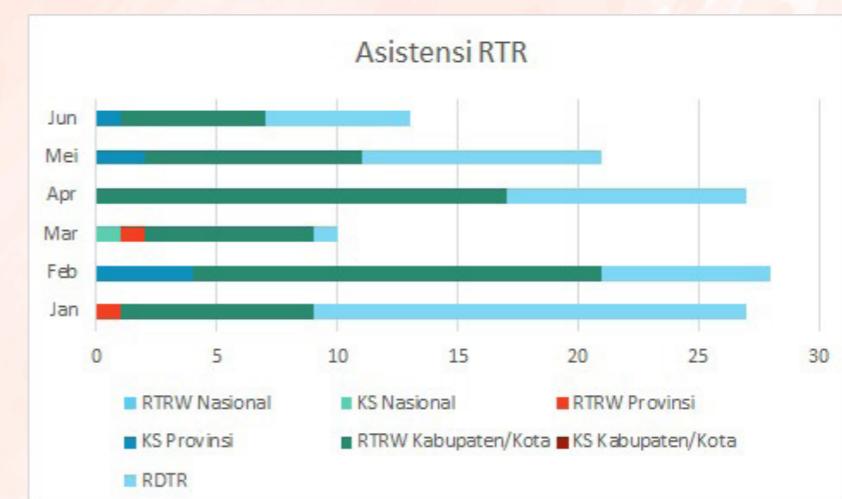
adalah perekiraman tahun data 2013-2015 sehingga diperlukan proses pembaharuan dengan metode tertentu. Berdasarkan hasil rapat beberapa dengan kondisi C-2 diarahkan melakukan pengukuran ke lapangan dikarenakan kurangnya titik GCP/ICP sehingga masuk ke C-3)

3. Cluster 3: Sudah terdapat sumber data berupa CSRT RAW di BIG yang diperoleh dari LAPAN namun belum di orthorektifikasi. Hal ini memungkinkan 2 kondisi : belum diukur GCP/ICP atau sedang menunggu proses orthorektifikasi.
4. Cluster 4: Tidak terdapat sumber data berupa CSRT RAW dimana LAPAN berkomitmen untuk melakukan akuisisi data CSRT pada lokasi prioritas penyusunan 2020. Akuisisi tersebut kemungkinan akan dilakukan pada bulan April-Mei.

Dalam pelaksanaannya, BIG dan ATR/BPN juga dibantu oleh LAPAN untuk proses akuisisi citra yang belum ada serta pemutakhiran untuk beberapa wilayah yang perlu dilakukan updating terhadap sumber datanya. Adapun progres pekerjaan saat ini pada masing-masing BWP sudah berjalan baik dari Cluster 1 hingga Cluster 4. Kegiatan ini sudah melalui beberapa kali pembahasan baik dari segi teknis dan kebijakan. Diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan secara paralel dengan penyusunan substansi materi teknis di Kementerian ATR/BPN yaitu tidak lewat dari bulan November atau Desember 2020. Namun, pandemi covid-19 membuat beberapa hal ditangguhkan seperti survei GCP/ICP ke lapangan sehingga tim berharap semoga pandemi segera berlalu dan kegiatan ini dapat terlaksana tepat pada waktunya. [Chintia Dewi, 2020].

Update Progres Kegiatan Tata Ruang

Progres Kegiatan Asistensi Tahun 2020						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
RTRW Nasional	0	0	0	0	0	0
KS Nasional	0	0	1	0	0	0
RTRW Provinsi	1	0	1	0	0	0
KS Provinsi	0	4	0	0	2	1
RTRW Kabupaten/Kota	8	17	7	17	9	6
KS Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
RDTR	18	7	1	10	10	6
Jumlah	27	28	10	27	21	13



Supervisi Integrasi IGT SDA untuk Mendukung KLHS RPJMD Kabupaten/Kota di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat

Neraca sumberdaya alam sebagai instrumen spasial dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup mampu menggambarkan kondisi terkini sumberdaya alam (SDA) terkait lokasi dan luasannya. Melalui neraca, akan dapat diketahui kuantitas awal SDA yang dinyatakan sebagai aktiva, pemanfaatannya yang dinyatakan sebagai pasiva, serta saldo akhir yang dinyatakan dalam bentuk *surplus* atau *defisit*. Kondisi akhir, baik surplus maupun defisit nantinya akan mempengaruhi pengambilan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah.

Neraca yang disusun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini tertuang dalam *Permenendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan*. Pada pasal 15 disebutkan bahwa KLHS dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bersama BIG memberikan dukungan penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJMD dimana neraca sumberdaya alam digunakan sebagai salah satu instrumen penyusunan KLHS.

Sebagai bentuk implementasinya, PPTRA BIG melaksanakan kegiatan Integrasi IGT SDA untuk Mendukung KLHS RPJMD Kabupaten/Kota di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual ini berlangsung selama lima bulan (Mei-Oktober 2020). Dalam pelaksanaannya, untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dilaksanakan serangkaian kegiatan supervisi teknis.

FGD PENGEMBANGAN E-ATLAS NASIONAL



Atlas Nasional, yang bertujuan untuk memberikan informasi pada pengguna terkait informasi geospasial tematik. Selain itu, portal ini dibuat untuk memudahkan para pengguna dalam mencari atau mengunduh atlas/peta multitema.

Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial mengadakan FGD pada tanggal 12 Juni 2020 sebagai tahap awal pengembangan E-Atlas Nasional dengan mengundang beberapa narasumber dari Universitas Ibnu Khaldun yang berpengalaman dalam pengembangan website dan aplikasi berbasis spasial. Adapun narasumber tersebut adalah Iksal Yanuarsyah, S.Hut, M.Sc, Fitrah Satrya, M.Kom, Eq Aliffauzi S, S.T, dan M. Aiman Fauzan, S.T. Hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan ini adalah terkait menu tampilan yang akan ditampilkan berupa tema atau pengguna, serta perlu menentukan batasan konten yang akan ditampilkan. Atlas merupakan penyederhanaan tampilan dari peta yang rumit, sehingga perlu disampaikan di

10 Rumah Aman, Program Dasa Wisma Lawan Corona

10 Rumah Aman adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah guna membantu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Aplikasi ini berbasis teknologi *Artificial Intelligence (AI)* yang menghubungkan data berbasis peta dan lingkungan sekitar melalui perangkat telepon seluler dan terhubung dengan platform media sosial.

Melalui aplikasi 10 Rumah Aman, masyarakat dapat mengukur suhu tubuh serta memeriksa kesehatan secara mandiri. Aplikasi ini dapat memantau daerah yang memiliki potensi penyebaran COVID-19, melalui pantauan suhu tubuh agar masyarakat dapat menghindari daerah tersebut.

Sebagai contoh, di menu Jadi Pejuang Aman, pengguna akan diminta melakukan misi 10 Rumah Aman, yaitu harus memastikan setidak-tidaknya 10 keluarga yang tinggal di sekelilingnya ikut berpartisipasi dengan mengunduh dan menggunakan fitur pada aplikasi. Sementara itu, pada menu Info Kesehatanmu dan Sepatu Covid-19, pengguna mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana

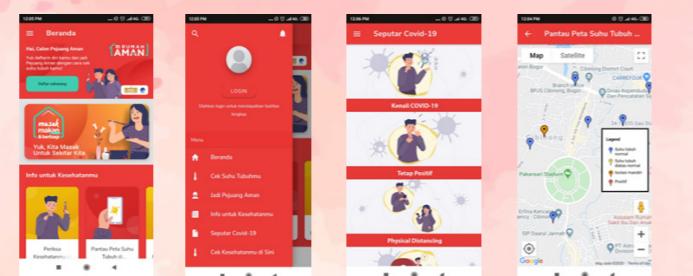
halaman awal terkait garis besar dari konten E-Atlas. Batasan konten diperlukan untuk mendesain alur mockup. Konten yang disepakati juga dapat memunculkan ide-ide baru dalam pembuatan atlas. Selain itu poin penting dari sebuah aplikasi adalah dapat diakses secara cepat melalui berbagai media, baik menggunakan komputer maupun *smartphone*.

Deputi Bidang IGT menyampaikan jika konsep dari Portal Atlas Nasional bukanlah berupa *data service* karena portal ini bukan merupakan layanan data. Portal atlas menitikberatkan pada cerita yang koheren dan berbentuk *time series*, seperti perubahan wilayah Indonesia dari masa ke masa dalam format *story map* atau video. Tantangan kedepan ada pada *content creator* yang dapat mengubah E-Atlas Nasional menjadi *platform* yang dapat bercerita sehingga membuat pengguna tertarik untuk membaca konten dan dapat menarik kesimpulan atas informasi yang diperoleh.

Pengembangan E-Atlas Nasional merujuk pada E-Atlas negara lain seperti Atlas Kanada dan Atlas Jepang. Rencananya tema umum yang akan ditampilkan meliputi fitur fisik, klimatologi, konservasi, lingkungan, kependudukan, sumberdaya, transportasi, komunikasi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Diharapkan Portal Atlas Nasional menjadi aplikasi yang memiliki tampilan lebih menarik, alur yang mudah dipahami, dan mudah diakses sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun pengambil kebijakan. [Zidni Farhati Silmi, 2020].

cara menghadapi dan upaya dalam mencegah penyebaran virus korona. Selain itu terdapat menu Cek Kesehatanmu di Sini yang dapat digunakan untuk memeriksakan kesehatan lewat aplikasi.

Dengan demikian, kehadiran aplikasi 10 Rumah Aman ini juga dapat mendukung himbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama pandemi Covid-19, serta dapat saling mengingatkan dan menjaga komunitas terdekat. [Rochmad Budi Santoso, 2020].



Pisah Sambut Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

Ada pertemuan ada perpisahan, kini yang tersisa tinggal kenangan. Masih teringat dalam bayangan, rasanya baru kemarin kita belajar merangkap bersama, berdiri hingga bisa berlari kesana kemari. Usia lima, tentulah masih balita untuk manusia, tapi ternyata kita beda, kita sudah bisa menggurita. Ratusan rekomendasi peta tata ruang telah diberikan, puluhan atlas telah diterbitkan dan beragam kajian spasial dinamis telah diluncurkan. Masih terbayang dalam ingatan, kita pernah bersama mendaki gunung-gunung, menelusuri sungai-sungai dan melewati batas kota hingga negara, hanya satu untuk Indonesia. Kini kita telah terpisah pada dua aliran sungai yang berbeda. Namun itu tak mengapa, biarkanlah dia mengalir menuju jalannya. Jika nanti kita tak lagi bermuara di tempat yang sama, yakinlah itu muara yang terbaik dan terindah untuk kita. Untuk Pak Mulyanto Darmawan, selamat melanjutkan perjuangan, segala jasamu akan selalu terkenang.



Selalu ada ganti untuk setiap yang pergi, ada yang datang untuk segala yang hilang. Hari ini adalah hari yang baru, lembaran kosong yang nantinya akan kita isi dengan warna-warni perjuangan. Meneruskan perjuangan ditengah pandemi Corona bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita harus bersama untuk menata ruang-ruang hati agar tetap semangat mengabdi, memetakan langkah serta menata dinamisnya semangat untuk tetap berkarya. Untuk mimpi-mimpi yang sempat terhenti, untuk setiap asa yang belum sempat terlaksana. Seperti sebuah pepatah, jangan berdoa meminta agar hidup dimudahkan, namun berdoalah agar selalu diberikan kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan dan kesulitan. Untuk Pak Khafid, selamat bekerja dan berkarya, bersama kita bisa.